

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU Nomor 17 tahun 2007 dinyatakan secara tegas, bahwa kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan disetiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara.

Terkait dengan pembangunan SDM yang berkualitas, dikatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya *Human Development Indeks*

(HDI) atau disebut juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa hal esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak. (Pratowo dalam UNDP, 2011)

Ada suatu indikator yang diperkenalkan oleh UNDP yang bisa dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur yang disebut dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. $IPM < 50$ (rendah)
2. $50 \leq IPM < 80$ (sedang/menengah)
3. $IPM \geq 80$ (tinggi)

Indikator pengukuran besarnya indeks pembangunan manusia juga dilihat dari tiga komponen, sebagai berikut:

- a. Indeks Harapan Hidup

Angka harapan hidup ialah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Perhitungan angka harapan hidup dapat kita peroleh melalui sumber data yakni dari Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

b. Indeks Pendidikan

Indikator pendidikan merupakan unsur yang dianggap sangat mendasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Ada dua variabel yang menjadi alat ukur untuk indikator pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

c. Indeks Hidup Layak

Ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan yang lebih luas standar hidup layak adalah gambaran tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai dampak membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto riil (PNB) yang disesuaikan, sedangkan BPS menghitung standar hidup layak menggunakan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan.

Indonesia sendiri telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. Dari tahun 1970 hingga 2010, Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi. Antara tahun 2000 dan 2015, proporsi penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional turun dari 19 persen menjadi kurang dari 11 persen. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2014 adalah 0,684, merupakan kemajuan luar biasa dari 0,474 pada tahun 1980, yang mencerminkan perbaikan yang signifikan untuk harapan hidup, akses ke pendidikan, dan pendapatan. (UNDP 2015)

Tabel 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Tahun	IPM
2010	66.53
2011	67.07
2012	67.7
2013	68.31
2014	68.9
2015	69.55
2016	70.18
2017	70.81

Sumber: BPS, berbagai tahun

Berdasarkan **Tabel 1.1**, indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya bisa dilihat dari IPM tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami

kemajuan. Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2017, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia mencapai 70,81. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan dengan tahun 2016. (BPS, 2018)

Tabel 1.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kepulauan Riau Periode Tahun 2010-2017

Wilayah	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kepulauan Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75	73.99	74.45
Karimun	66.4	66.82	67.67	68.52	68.72	69.21	69.84	70.26
Bintan	69.87	70.47	71.01	71.31	71.65	71.92	72.38	72.91
Natuna	66.29	67.76	68.8	69.39	70.06	70.87	71.23	71.52
Lingga	57.36	58.51	59.32	60.13	60.75	61.28	62.44	63.45
Kepulauan Anambas	63.03	63.71	64.32	64.86	65.12	65.86	66.3	67.06
Batam	76.98	77.82	78.39	78.65	79.13	79.34	79.79	80.26
Tanjungpinang	73.76	74.86	75.91	76.7	77.29	77.57	77.77	78

Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan **Tabel 1.2**, angka IPM provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tabel diatas dilihat bahwa diantara kabupaten dan kota yang terdapat di Kepri angka IPM paling kecil ialah di Kabupaten Lingga. Dan yang paling tinggi angka IPMnya adalah Kota Batam, karena penyebaran penduduk sebesar 58,80 persen terkonsentrasi di Kota Batam atau sebanyak 1.094.579 jiwa. Serta Kota Batam merupakan Kota Industri.

Dilihat dari terus naiknya angka IPM Indonesia dan juga angka IPM pada provinsi Kepulauan Riau, tentu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Menurut Todaro (dalam Yunitasari, 2007) yaitu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Serta modal manusia (*human capital*), juga merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Karena, dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi akan menjadi lebih baik. Menurut Todaro (dalam Mirza, 2012), sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan manusia salah satunya adalah ketika tingkat pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, maka yang terjadi adalah pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Maka sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia. (Lumbantoruan dkk, 2014)

Pertumbuhan ekonomi sendiri memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga

untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama rumah tangga miskin. (Lumbantoruan dkk dalam Ranis, 2014)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia adalah Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pendidikan. Pengeluaran pemerintah di bidang sektor kesehatan dan pendidikan merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah, bukan oleh swasta apalagi oleh pasar. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia kesehatan dan pendidikan yang baik bagi setiap masyarakat akan terwujud dengan adanya alokasi pengeluaran pemerintah disektor tersebut. Sehingga, nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang bisa meningkatkan pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah tersebut disebut sebagai investasi publik. (Astri dkk, 2013)

Faktor yang juga mempengaruhi adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK), dimana upah minimum adalah yang menjadi pertimbangan bagi seorang investor yang akan menanamkan modalnya di suatu daerah terutama bagi investor yang akan mendirikan sebuah pabrik atau industri yang nantinya akan dapat banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga, semakin tinggi upah minimum suatu daerah maka akan menunjukkan semakin tingginya tingkat ekonomi suatu daerah tersebut dan semakin tinggi laju pertumbuhan ekonominya suatu daerah maka, akan meningkatkan indeks pembangunan manusianya pula. (Chalid & Yusuf, 2014)

Kepulauan Riau adalah provinsi yang ditetapkan dengan 5 Kabupaten dan 2 Kota di Indonesia, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Jumlah penduduk Kepulauan Riau berdasarkan Sensus Penduduk 2010, pada tahun 2013 mencapai 1.861.373 jiwa dengan 952.106 penduduk laki-laki dan 909.267 penduduk perempuan.

Pada pertumbuhan ekonominya Kepulauan Riau triwulan IV-2017 tumbuh sebesar 2,57 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memberi andil pertumbuhan sebesar 1,48 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,48 persen. Ekonomi Kepulauan Riau dibandingkan dengan triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 1,37 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Tiga kategori yang memberikan andil tersebut adalah kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tahun 2017, secara kumulatif tumbuh sebesar 2,01 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 5,02 persen. (BPS, 2018)

Pada tahun 2017, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau resmi disahkan menjadi APBD melalui sidang paripurna istimewa Dewan. APBD Kepri tahun 2017 ini disahkan sebesar Rp 3,36 triliun dengan prioritas anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 26 persen dan sektor kesehatan sebesar 10,5 persen. Adapun

pengalokasian anggaran 2017, terdapat tujuh prioritas utama yang meliputi melanjutkan kegiatan yang tertunda tahun 2016, peningkatan pelayanan dasar pengembangan infrastruktur, pengembangan maritim dan pariwisata, pengembangan pembangunan sosial kemasyarakatan, ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan serta anggaran untuk tata kelola pemerintah. (Kemendagri, 2017)

B. Pembatasan Masalah

Dikarenakan faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat luas, maka peneliti akan membatasi pembahasan masalah pada Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau saja dan hanya menggunakan variabel laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan di Kepulauan Riau Tahun 2010-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau?

4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari pembahasan permasalahan ini adalah :

1. Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menjadi salah satu sumber bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat melengkapi kajian-kajian mengenai pembahasan Indeks Pembangunan Manusia dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.